

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN SAK ETAP KE SAK EP DALAM
PERLAKUAN PAJAK TANGGUHAN PADA PT ADK**

(Laporan Akhir)

Oleh

KA'AB WIJAYA

2301061015



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERUBAHAN SAK ETAP KE SAK EP DALAM PERLAKUAN PAJAK TANGGUHAN PADA PT ADK

Oleh

Ka'ab Wijaya

2301061015

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ke Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) membawa implikasi penting bagi entitas privat, termasuk PT ADK, khususnya terkait kewajiban pengakuan pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diatur. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi perubahan standar akuntansi tersebut memengaruhi perlakuan pajak tangguhan serta dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil analisis laporan keuangan PT ADK tahun 2024 menunjukkan adanya koreksi fiskal atas laba sebelum pajak, di antaranya terdapat beda temporer sebesar Rp234.386.153 yang menjadi dasar perhitungan pajak tangguhan. Dari koreksi beda waktu tersebut dihitung pajak tangguhan sebesar Rp51.564.954 yang diklasifikasikan sebagai aset pajak tangguhan, karena akan memberikan manfaat pajak di masa depan ketika perbedaan temporer berbalik. Ketentuan transisi pertama kali Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ke Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) mengharuskan adanya penyesuaian saldo dan penyajian kembali data komparatif, sehingga laporan keuangan PT ADK menjadi lebih akurat, transparan, dan selaras dengan standar internasional.

Kata kunci: SAK ETAP, SAK EP, Pajak Tangguhan, Laporan Keuangan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE TRANSITION FROM SAK ETAP TO SAK EP IN DEFERRED TAX TREATMENT AT PT ADK

By

Ka'ab Wijaya

2301061015

Financial Accounting Standards (SAK) serve as the primary guideline in preparing corporate financial statements. The transition from Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) to Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) carries significant implications for private entities, including PT ADK, particularly regarding the mandatory recognition of deferred tax which was previously unregulated. This study aims to analyze how the implementation of this accounting standard transition affects deferred tax treatment and its impact on the company's financial statements. The method employed is descriptive-quantitative, with data collection techniques encompassing observation, documentation, and literature review. The analysis of PT ADK's 2024 financial statements reveals fiscal corrections on pre-tax profit, including a temporary difference of Rp234,386,153, which serves as the basis for the deferred tax calculation. From this timing difference, a deferred tax of Rp51,564,954 was calculated and classified as a deferred tax asset, as it will provide future tax benefits when the temporary difference reverses. The first-time transition provisions from SAK ETAP to SAK EP mandate balance adjustments and the restatement of comparative data, thereby rendering PT ADK's financial statements more accurate, transparent, and aligned with international standards.

Keywords: SAK ETAP, SAK EP, Deffered Tax, Financial Statements

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN SAK ETAP KE SAK EP DALAM
PERLAKUAN PAJAK TANGGUHAN PADA PT ADK**

**OLEH
KA'AB WIJAYA**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Diploma III Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : IMPLEMENTASI PERUBAHAN SAK ETAP
KE SAK EP DALAM PERLAKUAN PAJAK
TANGGUHAN PADA PT ADK**

Nama Mahasiswa : Ka'ab Wijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301061015

Program Studi : D III AKUNTANSI

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS



**Menyetujui,
Pembimbing**

Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

NIP. 19820220 200812 2 003

**Mengetahui
Ketua Program Studi**

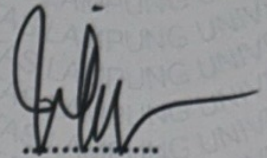
Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

NIP. 19820220 200812 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

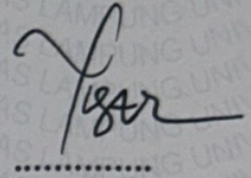
1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA



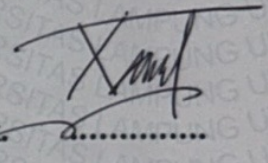
.....

Penguji Utama : Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ak., Ph.D.



.....

**Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak.
BKP. CA.**



.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nanrobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 22 April 2026

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

IMPLEMENTASI PERUBAHAN SAK ETAP KE SAK EP DALAM PERLAKUAN PAJAK TANGGUHAN PADA PT ADK

Adalah hasil karya saya sendiri

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026

Yang Memberi pernyataan



Ka'ab Wijaya
2301061015

RIWAYAT HIDUP

Nama penulis adalah Ka'ab Wijaya. Penulis dilahirkan di Desa Pasuruan pada tanggal 30 September 2005. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara atas pasangan Ibu Nurdiana Wita dan Ayah Agus Riadi.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Pasuruan, Lulus pada tahun 2017.
2. SMP Negeri 1 Penengahan, Lulus pada tahun 2020.
3. SMA Negeri 1 Kalianda, Lulus pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Program Studi Diploma III Akuntansi, Universitas Lampung melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Pada tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto dan Muhaemin yang berada di Jalan Pelita I No. 2 D, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung

MOTTO

“Love Yourself”

“Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah yang ada pada diri mereka.”

(Q.S Ar-Rad: 11)

“Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu.”

(Sulung-Kunto Aji)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur penulis atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat mempersembahkan laporan akhir ini sebagai tanda terimakasih pada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku, Ibu Nurdiana Wita dan Ayah Agus Riadi, terimakasih telah membesarkan, memberikan dedikasi dan senantiasa selalu memberikan dukungan selama ini, terimakasih telah memberikan banyak bantuan berupa moril dan materil, terimakasih atas kasih sayang yang selalu diberikan sampai saat ini.
- ❖ Kakak, adik, dan sahabat-sahabatku yang selalu menjadi penyemangat dikala jenuh dan bosan saat berkegiatan.
- ❖ Diri sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini.
- ❖ Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- ❖ Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam Menyusun Laporan Akhir ini

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikam rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan pada KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin di Jalan Pelita I No.2 D, Labuhan Ratu, Bandar Lampung yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERUBAHAN SAK ETAP KE SAK EP DALAM PERLAKUAN PAJAK TANGGUHAN PADA PT ADK”**. Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md).

Pada penyusunan laporan akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Laporan Akhir, diantaranya:

1. Allah SWT atas perlindungan, kemudahan dan ridho yang diberikan selama proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang sangat membantu dan memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan Laporan Akhir Ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membimbing, mendidik, dan membagikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

5. Kedua Orang Tua Penulis terima kasih telah menjadi pelabuhan paling tenang di tengah badai perjalanan hidup ini. Seperti lirik lagu Nadhif, 'padahal kutahu hatimu terluka, kau peluk jiwaku dengan suka cita'. Terima kasih telah menyembunyikan lelah dan luka kalian hanya demi memastikan duniaku tetap baik-baik saja. Selama kalian masih tertawa, aku tahu duniaku akan selalu baik-baik saja. Semoga Tuhan selalu memberi waktu dan kesehatan untuk melihatku tumbuh dan berguna.
6. Saudara Kandung penulis, Abang Renaldi Fariq Wibowo, dan Adik Habil Khuwarun Hidayat. Terima kasih telah atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan, serta doa yang tiada henti untuk mencapai kesuksesan bersama.
7. Bapak R. Weddie Andriyanto S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku pimpinan KAP KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin yang telah mengizinkan serta memfasilitasi penulis selama melakukan praktik kerja lapangan.
8. Bapak Muhammad Ferdys, S.E., CA. Selaku Instruktur Lapangan yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan selama Praktik Kerja Lapangan di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin hingga terselesaikannya penyusunan Laporan Akhir ini.
9. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Khususnya kepada Ibu Fuji yang telah membantu penulis selama kuliah dan menyusun Laporan Akhir Ini.
10. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh Karyawan, Staff, dan Kakak-kakak Tim Auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto dan Muhaemin yang telah memberikan ilmu, bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
11. Teman lucu penulis, Aurel Aprilia. Terima kasih yang tak terhingga dar penulis telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, pendengar yang sabar, serta pemberi dukungan moral yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
12. Sahabat-sahabat penulis, Adnan, Iffah Ananta, Xender, Nafisa, Fadhil, Habib, Lidia, dan Jo. Terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran, berkeluh

kesah, dan tempat bercanda selama proses perkuliahan hingga pada tahap penulisan Laporan Akhir.

13. Terima kasih penulis pada teman-teman HMI Komisariat Ekonomi Unila Angkatan 2023 atas segala suka duka yang kita rangkai di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
14. Terima kasih penulis pada jajaran presidium dan pengurus Himakta periode 2024/2025 atas segala perjuangan di satu kepengurusan dan berhasil melalui hiruk pukuknya dalam menjalankan amanah yang besar ini.
15. Terima kasih pada partner PKL penulis, Ririn, Gabby, Tiara yang telah bersama-sama berbagi kesulitan dan kebahagiaan selama proses penyusunan laporan akhir ini.
16. Teman-teman D3 Akuntansi Angkatan 2023 yang telah ersama-sama menuntut ilmu serta menjalin pertemanan yang baik selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam proses penulisan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, yang sebagaimana penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan serta kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan Ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026

Penulis

Ka'ab Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan	6
2.2 Standar Akuntansi Keuangan	6
2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan.....	6
2.2.2 Jenis-jenis Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia	7
2.3 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat	9
2.3.1 Latar belakang perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP	9
2.3.2 Konsep SAK Indonesia untuk Entitas Privat.....	10
2.3.3 Ketentuan Transisi pertama kali serta Implikasi retrospektif dalam SAK EP.....	13
2.4 Konsep Pajak Tangguhan.....	15
2.4.1 Pengertian Pajak	15

2.4.2	Perbedaan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan.....	16
2.4.3	Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan	17
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....		19
3.1	Desain Penelitian Bersifat Deskriptif Kuantitatif	19
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	19
3.2.1.	Jenis Data.....	19
3.2.1.	Sumber Data	20
3.3	Metode pengumpulan Data	20
3.4	Objek Kerja Praktik	21
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	21
3.4.2	Profil Singkat KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin (Cabang Lampung).....	21
3.4.3	Struktur Organisasi	22
3.4.4	Visi dan Misi	22
3.4.5	Jasa Pelayanan	23
3.4.6	Pengguna Jasa atau Klien	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Profil Objek Penelitian.....	25
4.2	Laporan Keuangan PT ADK	26
4.3	Rekomendasi Perbaikan Laporan Keuangan Tahun 2024	29
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan	40
5.2	Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin22

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Jenis-jenis SAK yang berlaku di Indonesia.....	9
Tabel 2. 3 Perbedaan Utama SAK ETAP dan SAK EP	13
Tabel 4. 1 Laporan Posisi Keuangan.....	27
Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi dan Laporan Penghasilan Komprehensif.....	28
Tabel 4. 3 Laporan Perubahan Ekuitas.....	29
Tabel 4. 4 Jurnal Penyesuaian	34
Tabel 4. 5 Laporan Posisi Keuangan Setelah Penyajian Kembali	36
Tabel 4. 6 Laporan Penghasilan Komprehensif Setelah Penyajian Kembali	38
Tabel 4. 7 Laporan Perubahan Ekuitas Setelah Penyajian Kembali	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Logbook Minggu Ke- 1	45
Lampiran 2 Logbook Minggu ke- 2.....	48
Lampiran 3 Logbook Minggu Ke- 3	51
Lampiran 4 Logbook Minggu Ke- 4	54
Lampiran 5 Logbook Minggu Ke- 5	57
Lampiran 6 Logbook Minggu Ke- 6	60
Lampiran 7 Logbook Minggu Ke- 7	62
Lampiran 8 Koreksi Fiskal Tahun 2024.....	64
Lampiran 9 Utang Pajak Tahun 2024.....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah bentuk tanggung jawab entitas bisnis atas kinerja selama satu periode. Menurut Perdana (2021), laporan keuangan adalah hasil refleksi dari berbagai transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Setiap transaksi dan kejadian yang berkaitan dengan keuangan dicatat, dikategorikan, dan dihitung dengan benar dalam bentuk uang, lalu dilakukan analisis untuk berbagai kepentingan. Karena laporan keuangan menjadi tanggung jawab dari entitas bisnis, sehingga diperlukan suatu keahlian dan standar untuk dapat menyusun laporan yang andal, relevan dan transparan.

Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, perusahaan di Indonesia perlu meningkatkan daya saing internasional dengan mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Internasional dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Murtini (2017) dalam Gusneli et al. (2023), pelaksanaan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) di Indonesia telah membawa efek baik dan buruk pada dunia pelaporan keuangan di negara ini. Implementasi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) telah meningkatkan mutu informasi akuntansi, terlihat dari berkurangnya manajemen laba dan meningkatnya relevansi nilai laba. Dengan demikian, penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai strategi penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, memperluas akses ke pasar modal internasional, serta memperkuat posisi daya saing perusahaan Indonesia dalam ekosistem bisnis global.

Pada pelaksanaannya, tidak semua prinsip dalam Standar Akuntansi (SAK) Internasional bisa diterapkan di seluruh entitas bisnis karena karakteristiknya yang beragam. Ini mendorong kebutuhan akan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang konsisten dan berkualitas yang bisa diterapkan di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disusun dan dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) memiliki wewenang untuk menentukan praktik akuntansi di dalam negeri. Pentingnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) semakin bertambah sejalan dengan meningkatnya kerumitan transaksi ekonomi dan kebutuhan akuntabilitas dari berbagai pihak yang berkepentingan (Sukma et al., 2025). Di negara Indonesia terdapat 4 pilar SAK yang berlaku di Indonesia, pertama, SAK Internasional, ditujukan bagi entitas bisnis yang memiliki akuntabilitas publik dan berhak menyusun laporan keuangan sesuai standar internasional, sebagaimana diatur oleh regulasi pasar modal yang berlaku. Kedua, SAK Indonesia, merupakan hasil konvergensi dari IFRS yang dapat digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik namun tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan SAK Internasional. Ketiga, SAK ETAP, yang dalam perkembangannya akan digantikan oleh SAK EP yang diadaptasi dari IFRS for SMEs dengan sejumlah penyesuaian agar lebih relevan dengan kondisi bisnis di Indonesia. Keempat, SAK EMKM, disusun secara lebih sederhana dibandingkan pilar lainnya, dan diperuntukkan khusus bagi entitas mikro, kecil, serta menengah agar tetap dapat menyajikan laporan keuangan sesuai standar (Aprilia et al., 2025).

Dahulu sebelum terjadinya perubahan kebijakan besar di Indonesia, semua entitas non-publik menggunakan SAK ETAP. Namun, perkembangan praktik akuntansi menuntut adanya perkembangan. Mulai 1 Januari 2025, SAK ETAP resmi digantikan oleh SAK EP. Pergantian ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan sebuah transformasi mendasar dalam metode pengakuan dan pengukuran pos-pos akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) menghadirkan standar yang lebih relevan, konsisten, dan mendekati *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, namun tetap mempertahankan kesederhanaan agar sesuai dengan karakteristik entitas privat di

Indonesia. Sejalan dengan pernyataan PwC Indonesia (2023) dalam Nur et al. (2025), setelah penyerapan dari IFRS for SMEs edisi 2015, SAK Entitas Privat (SAK EP) disusun untuk memberikan kemudahan bagi berbagai jenis usaha seperti perusahaan keluarga, koperasi, start-up, serta bisnis kecil dan menengah. Standar ini tetap selaras dengan SAK Internasional yang berbasis IFRS penuh, sehingga memungkinkan laporan keuangan entitas untuk naik kelas tanpa harus melakukan *restatement* yang besar. Penggunaan SAK EP dapat dilakukan oleh entitas privat sepanjang tidak memiliki status sebagai lembaga keuangan, tidak menerbitkan instrumen di pasar modal, dan tidak diwajibkan oleh regulator untuk menggunakan SAK umum.

Perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP membawa implikasi yang signifikan bagi entitas privat di Indonesia. Menurut Rizky (2025), menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya terbatas pada aspek format laporan keuangan, melainkan juga mencakup pergeseran mendasar dalam prinsip akuntansi. Pergeseran tersebut antara lain meliputi transisi dari *cash basis* ke *accrual basis*, penerapan model pengakuan pendapatan lima langkah, pengakuan cadangan kerugian piutang (CKPN), pengakuan imbalan pascakerja, serta pengakuan pajak tangguhan. Para praktisi, baik auditor maupun akademisi, menekankan bahwa sejumlah konsep dalam SAK EP masih relatif baru bagi pelaku UMKM maupun staf akuntansi mereka, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif serta pelatihan teknis yang memadai. Menurut IAI (2020), mengungkapkan pos-pos minimum dalam laporan posisi keuangan meliputi: aset keuangan beserta liabilitas keuangan, aset biologis, investasi pada entitas asosiasi maupun ventura bersama, aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan, dan kepentingan nonpengendali. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas dan diangkat dalam pembahasan ini yaitu terkait penyesuaian perlakuan pajak tangguhan. Jika sebelumnya SAK ETAP tidak mengatur pos pajak tangguhan, maka SAK EP dalam bab pajak penghasilan mewajibkan entitas untuk melakukan pengakuan pajak tangguhan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi entitas privat, termasuk PT ADK.

PT ADK merupakan institusi keuangan yang bergerak di bidang perbankan dengan status sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Lampung. Dalam menjalankan fungsinya, bank ini menitikberatkan pada pelayanan masyarakat serta memiliki posisi penting dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan SAK EP di PT ADK yang merupakan klien dari KAP Weddie & Muhaimin dalam mengimplemtrasikan pos pajak tangguhan menjadi tantangan bagi perusahaan, karena mengharuskan perusahaan melakukan penyusunan laporan keuangan secara retrospektif atau seakan-akan metode akuntansi yang baru telah digunakan sejak awal. Menurut Anshari dan Anggraita (2025), sebagai akibat dari perubahan standar, laporan keuangan disusun dengan pendekatan retrospektif, di mana perusahaan menyesuaikan saldo awal dari semua elemen ekuitas yang terkena dampak selama periode penyajian yang paling awal.

Namun, dalam proses penyusunan laporan keuangan, salah satu kendala yang muncul adalah perlakuan terhadap pajak tangguhan yang belum tentu sudah disajikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan memastikan pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan serta ketentuan transisi sesuai SAK EP. Agar proses transisi ini berjalan sesuai ketentuan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengatur perlakuan pajak tangguhan dalam SAK EP. Dalam hal ini, auditor berperan penting untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar baru, menguji keandalan perhitungan pajak tangguhan, serta memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Perubahan SAK ETAP ke SAK EP dalam Perlakuan Pajak Tangguhan pada PT ADK”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi SAK EP terhadap penyajian akun pajak tangguhan dalam Laporan Posisi Keuangan PT ADK.
2. Bagaimana penerapan retrospektif dalam perlakuan pajak tangguhan pada saat transisi dari SAK ETAP ke SAK EP di PT ADK.
3. Apa perubahan yang terjadi pada laporan keuangan PT ADK setelah menerapkan pajak tangguhan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan laporan akhir adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi SAK EP terhadap perlakuan akun pajak tangguhan dalam Laporan Posisi Keuangan PT ADK.
2. Mengkaji penerapan retrospektif dalam pengakuan pajak tangguhan pada saat transisi dari SAK ETAP ke SAK EP di PT ADK.
3. Menganalisis perbandingan laporan keuangan setelah penerapan pajak tangguhan di PT ADK.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka manfaat laporan akhir adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan bagi pembaca dan penulis terkait perubahan standar akuntansi dari SAK ETAP ke SAK EP.
2. Menambah pengetahuan implementasi perubahan SAK ETAP ke SAK EP dalam perlakuan pajak tangguhan pada perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi penyajian laporan posisi keuangan PT ADK dalam perlakuan pajak tangguhan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan cerminan atas rangkaian transaksi yang berlangsung dalam suatu entitas bisnis. Setiap aktivitas maupun peristiwa yang memiliki implikasi finansial dicatat, diklasifikasikan, serta diukur secara tepat dalam satuan moneter, kemudian diolah dan dianalisis untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (Perdana, 2021). Menurut IAI (2024b), laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai penyajian informasi mengenai kondisi perusahaan, tetapi juga merefleksikan hasil dari penatagunaan sumber daya oleh manajemen. Dengan demikian, laporan tersebut menjadi sarana untuk menunjukkan akuntabilitas manajemen atas aset dan kewenangan yang telah dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas serta laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berperan sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi finansial maupun aktivitas operasionalnya.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya standar tersebut, penyajian laporan keuangan dapat dilakukan secara konsisten, sehingga memudahkan para pengguna dalam menafsirkan informasi yang disajikan serta memungkinkan dilakukannya analisis perbandingan antar entitas (Nur et al., 2025).

Menurut Sukma et al. (2025), penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada hakikatnya dimaksudkan untuk memastikan adanya konsistensi sekaligus transparansi dalam praktik pelaporan keuangan di tingkat nasional. Melalui standar tersebut, para pengguna laporan keuangan memperoleh landasan yang objektif serta terstruktur, sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan secara lebih efektif.

2.2.2 Jenis-jenis Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Di Indonesia terdapat empat pilar SAK yang berlaku dan menjadi pedoman dalam pencatatan laporan keuangan, diantaranya yaitu SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK EP yang dalam hal ini telah menggantikan SAK ETAP per 1 Januari 2025, dan yang terakhir SAK EMKM (IAI, 2024b). Berikut penjelasan dari keempat pilar SAK yang berlaku di Indonesia:

1. SAK Internasional (*International Financial Reporting Standards*)

Menurut Devi et al. (2025), IFRS merupakan seperangkat standar, interpretasi, serta kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Sebelum dikenal dengan istilah IFRS, standar ini lebih dahulu disebut sebagai Standar Akuntansi Internasional (IAS). Menurut Erick (2025), Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Internasional ditujukan bagi entitas bisnis yang memiliki akuntabilitas publik. Entitas tersebut berhak menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK Internasional, sebagaimana diatur oleh regulasi yang berlaku dalam pasar modal.

Menurut Devi et al. (2025), adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) telah memberikan peran penting dalam menyelaraskan praktik pelaporan keuangan dengan standar internasional. Namun demikian, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur pendukung, pengaruh karakteristik budaya lokal, serta kondisi perekonomian nasional yang masih didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, mengingat masih adanya hambatan yang dialami oleh negara Indonesia

dalam proses pelaporan keuangan, diperlukan penyesuaian dalam praktik standarisasi laporan keuangan di negara kita.

2. SAK Indonesia (Umum)

Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang dengan keberagaman jenis usaha yang mencakup skala internasional, nasional, maupun lokal. Penerapan IFRS harus dilakukan secara bertahap melalui pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menurut IAI (2024b), SAK Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini bisa digunakan oleh entitas besar yang ada di Indonesia yang memiliki akuntabilitas publik tetapi tidak berhak untuk menerapkan SAK Internasional.

3. SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP)

Entitas privat merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, namun tetap menyusun laporan keuangan dengan tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna eksternal (IAI, 2024b). Menurut DSAK-IAI (2025) dalam Erick (2025), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan bentuk pembaruan sekaligus pengganti dari SAK ETAP yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) bertujuan untuk menyesuaikan praktik pelaporan keuangan di Indonesia dengan pedoman internasional, yakni *IFRS for Small and Medium-sized Entities* (IFRS for SMEs). Standar ini memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi, memperluas penerapan nilai wajar (*fair value*), serta meningkatkan kualitas pengungkapan agar laporan keuangan entitas non-publik menjadi lebih relevan, transparan, dan dapat diperbandingkan. Entitas yang

memiliki akuntabilitas publik dapat menerapkan SAK EP jika diizinkan oleh regulasi otoritas berwenang (IAI, 2026).

4. SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Berdasarkan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam Pratama dan Indrawati (2021), standar ini dirancang khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Karakteristik SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan dengan SAK EP karena menggunakan dasar pengukuran berupa biaya historis secara murni, serta mengatur jenis transaksi yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha EMKM.

Tabel 2.2 di bawah ini menjelaskan berbagai jenis SAK yang berlaku di Indonesia dan jenis entitas apa saja yang dapat menerapkan SAK tersebut.

Tabel 2. 2 Jenis-jenis SAK yang berlaku di Indonesia

Jenis Entitas	SAK Internasional	SAK Indonesia	SAK EP	SAK EMKM
Entitas dengan akuntabilitas publik	✓	✓	Jika diizinkan Regulator	Jika diizinkan Regulator
Entitas tanpa akuntabilitas publik - besar	-	✓	✓	-
Entitas tanpa akuntabilitas publik - mikro, kecil, dan menengah	-	✓	✓	✓

Sumber: Berita IAI (2024a).

2.3 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat

2.3.1 Latar belakang perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP

SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), yang didefinisikan sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan bertujuan umum untuk pengguna eksternal dan tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan. Standar ini diterbitkan pada tahun 2009 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011, dengan opsi implementasi dini sejak 1 Januari 2010 (Madaharsa & Muslimin, 2025). Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan serta tidak menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, seperti investor publik. SAK ETAP dirancang guna memberikan kemudahan bagi entitas kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan yang tetap andal, namun dengan kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan standar umum berbasis IFRS (Erick, 2025).

Salah satu alasan utama penggantian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) adalah karena SAK ETAP dinilai terlalu sederhana untuk diterapkan pada entitas privat. Sebaliknya, SAK EP disusun dengan cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP, namun tetap lebih sederhana daripada standar akuntansi berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS) (Suhendar et al., 2023). Pada tanggal 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 sebagai pengganti SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penerapan awal standar ini diperkenankan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) sendiri mengadopsi *International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities* (IFRS for SMEs) edisi tahun 2015 (Adisti & Devianti, 2024). Transisi SAK ETAP ke SAK EP merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing global entitas privat di Indonesia (Erick, 2025). Dengan adanya perubahan standar SAK EP, entitas privat dapat diterima secara luas oleh lembaga keuangan/bank karena sudah menerapkan standar yang komprehensif namun tetap praktis bagi entitas privat.

2.3.2 Konsep SAK Indonesia untuk Entitas Privat

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) dirancang lebih sederhana daripada SAK Umum berbasis IFRS dengan menghilangkan topik yang tidak relevan bagi entitas privat seperti laba per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi, serta menyederhanakan opsi kebijakan akuntansi menjadi

kebijakan tunggal, misalnya penggunaan model biaya untuk properti investasi jika nilai wajar memerlukan biaya atau upaya berlebihan. Selain itu, standar ini menyederhanakan berbagai prinsip pengakuan dan pengukuran, mengurangi jumlah pengungkapan yang diperlukan, dan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami untuk meringankan beban kepatuhan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik (IAI, 2026). Dengan karakteristik tersebut, SAK EP tidak hanya mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan transparansi informasi yang disajikan. Untuk melihat lebih jauh penerapan konsep ini, pembahasan berikut akan menguraikan konsep Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

1. Ruang Lingkup

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) memiliki perbedaan ruang lingkup yang jelas berdasarkan skala entitas dan tingkat kompleksitas pelaporan keuangannya. Menurut Erick (2025), menjelaskan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mencakup entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, namun tetap menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, seperti pemilik, kreditor, atau pihak lain yang tidak memiliki akses langsung terhadap informasi internal. Contoh entitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, serta perusahaan keluarga yang tidak terdaftar di bursa efek. Sementara itu, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) memiliki cakupan yang lebih luas, ditujukan bagi entitas privat berskala menengah ke atas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi menghadapi kompleksitas transaksi dan kebutuhan pelaporan yang lebih tinggi. Entitas yang termasuk dalam kategori ini biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) non-go publik, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta entitas jasa profesional atau manufaktur berskala menengah.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut IAI (2024b), laporan keuangan lengkap entitas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK EP) terdiri dari:

1. laporan posisi keuangan periode berjalan;
2. salah satu dari:
 - a) Laporan Penghasilan Komprehensif
Menyajikan seluruh komponen pendapatan dan beban dalam satu laporan terpadu, yang mencakup subtotal laba rugi periode berjalan serta pos-pos penghasilan komprehensif lain secara berkesinambungan.
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Terpisah
Jika entitas memilih untuk menyajikan keduanya, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif, maka laporan penghasilan komprehensif dimulai dengan laba rugi dan kemudian menampilkan item penghasilan komprehensif lain.
3. laporan perubahan ekuitas selama periode berjalan;
4. laporan arus kas selama periode berjalan; dan
5. catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

3. Perbedaan Utama SAK ETAP dan SAK EP

Tabel 2.3 di bawah ini menjelaskan berbagai karakteristik yang membedakan antara SAK ETAP dan SAK EP. Perbedaan ini menandakan adanya sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan SAK EP, terutama karena standar ini lebih kompleks dan komprehensif dibandingkan SAK ETAP, meskipun masih lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum (Anshari & Anggraita, 2025). Adapun beberapa perbedaan utama SAK ETAP dan SAK EP.

Tabel 2. 3 Perbedaan Utama SAK ETAP dan SAK EP

Karakteristik	SAK ETAP (Lama)	SAK EP (Baru)
Landasan Standar	Disusun Secara Nasional Dengan Penyederhanaan	Adopsi IFRS for SMEs (Versi 2015)
Istilah Laporan	Neraca	Laporan Posisi Keuangan
Laporan Laba Rugi	Hanya Laba Rugi	Laporan Penghasilan Komprehensif (Laba Rugi + OCI)
Pajak Tangguhan	Tidak diakui	Wajib diakui (Pajak Kini & Tangguhan)
Investasi Properti	Hanya Model Biaya	Bisa menggunakan Model Nilai Wajar
Konsolidasi	Tidak diatur	Diatur (Wajib menyusun Laporan Konsolidasian)
Arus Kas	Hanya Metode Tidak Langsung	Boleh Langsung atau Tidak Langsung
Imbalan Pasca Kerja	Tidak diatur	Wajib diakui → pascakerja, pesangon, jangka panjang (metode aktuarial)
Kerugian Piutang	<i>Incurring loss</i> (diakui hanya jika kerugian sudah terjadi)	<i>Expected Credit Loss</i> (ECL) (berbasis estimasi risiko)

Sumber: Pramudya (2026).

2.3.3 Ketentuan Transisi pertama kali serta Implikasi retrospektif dalam SAK EP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku efektif 1 Januari 2025 mengadopsi IFRS for SMEs (Versi 2015). Penerapan IFRS dalam laporan keuangan dapat meningkatkan relevansi, transparansi, dan komparabilitas yang disajikan (Prasasti et al., 2025). Dengan adanya perubahan tersebut perusahaan harus mengikuti standar yang berlaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam buku SAK Indonesia untuk Entitas Privat yang diterbitkan oleh IAI (2024b), berikut adalah beberapa ketentuan utama dalam penyusunan laporan keuangan untuk entitas privat berdasarkan SAK EP:

1. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Entitas dalam mengadopsi kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan dalam hal ini SAK EP penerapan perubahan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

1. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi yang dihasilkan dari perubahan persyaratan Standar ini sesuai dengan ketentuan transisi, jika ada, yang diatur dalam amendemen tersebut;
2. Entitas mencatat seluruh perubahan lain dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif.

2. Penerapan Retrospektif

Ketika suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan penerapan perubahan kebijakan akuntansi, entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang baru pada informasi komparatif untuk periode sebelumnya hingga tanggal paling awal sepanjang praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan atau yang disebut retrospektif. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode-individual dari perubahan kebijakan akuntansi tentang informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis, yang mungkin merupakan periode berjalan, dan membuat penyesuaian terkait untuk saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut.

3. Ketentuan Transisi pada Tanggal Adopsi Pertama Kali

Pada tanggal transisi ke SAK EP (awal periode sajian paling awal), entitas harus:

1. Mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya disyaratkan oleh SAK Indonesia untuk Entitas Privat;
2. Tidak mengakui item sebagai aset atau liabilitas jika Standar ini tidak mengizinkan pengakuan tersebut;

3. Mereklasifikasi item yang diakui berdasarkan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya sebagai satu jenis aset, liabilitas atau komponen ekuitas, namun merupakan jenis aset, liabilitas atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan Standar ini; dan
4. Menerapkan Standar ini dalam mengukur seluruh aset dan liabilitas yang diakui.

4. **Kesalahan dan Informasi Komparatif**

Jika entitas menemukan kesalahan dari kerangka pelaporan sebelumnya, maka laporan keuangan harus disajikan kembali secara retrospektif.

1. Informasi komparatif periode sebelumnya wajib diungkapkan, baik berupa jumlah moneter maupun informasi naratif/deskriptif.
2. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan pada periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode paling awal yang praktis.

5. **Materialitas dalam Akun Terpengaruh**

Meskipun prinsip retrospektif berlaku, entitas diperbolehkan untuk tidak menyajikan kembali pos yang tidak material. Artinya tingkat efektifitas diperhatikan dalam menentukan apakah perlu penerapan retrospektif atau tidak, dengan catatan:

1. Pos yang material wajib disajikan kembali agar laporan keuangan tetap relevan dan andal.
2. Pos yang tidak material dapat dikecualikan, sehingga transisi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas informasi.

2.4 **Konsep Pajak Tangguhan**

2.4.1 **Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan

Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beban pajak merupakan gabungan antara pajak kini dan pajak tangguhan, yang penyajiannya tercermin dalam total laba komprehensif maupun ekuitas pada suatu periode pelaporan (IAI, 2025).

2.4.2 Perbedaan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Dalam praktik akuntansi pajak, terdapat dua kategori beban pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Beban pajak yang yaitu gabungan beban pajak kini (*current tax*) dan beban pajak tangguhan (*deferred tax*) yang tercermin dalam total laba komprehensif maupun ekuitas pada suatu periode pelaporan (IAI, 2024b). Menurut IAI (2025), pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau dipulihkan atas laba kena pajak maupun rugi pajak dalam suatu periode tertentu. Perbedaan perhitungan pajak kini dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku, serta wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Septianingrum et al. (2022), menjelaskan beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut terjadi karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi manajemen dalam penerapan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan ketentuan yang diperbolehkan menurut regulasi perpajakan.

Menurut Hamdi dan Utami (2024) perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Perbedaan permanen atau tetap, yaitu perbedaan yang timbul akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final atau PPh final, maupun biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*), seperti bunga deposito.

2. Perbedaan temporer atau waktu, yakni perbedaan yang muncul karena adanya perbedaan waktu pengakuan beban dalam laporan keuangan komersial dan fiskal. Perbedaan temporer ini berkaitan dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atas suatu aset atau kewajiban, yang berimplikasi pada peningkatan atau penurunan laba fiskal di periode mendatang.

Pajak kini dan pajak tangguhan terjadi dengan sebab yang berbeda. Pajak kini timbul akibat beda tetap yang bersifat permanen, yaitu sejumlah pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang. Pajak tangguhan terjadi karena adanya beda pencatatan antara akuntansi dan perpajakan pada beda temporer dan tidak akan muncul atas suatu beda tetap yang bersifat permanen.

2.4.3 Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Dengan diberlakukannya Standar Akuntansi untuk Entitas Privat (SAK EP) melalui Bab 29 tentang Pajak Penghasilan, entitas privat diwajibkan untuk mengakui pajak tangguhan. Perubahan mendasar ini menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas dalam pelaporan keuangan, sekaligus menjadi salah satu aspek krusial yang membedakan SAK EP dari SAK ETAP. Perlu ditegaskan bahwa dalam SAK ETAP tidak terdapat pengaturan mengenai pajak tangguhan, sehingga entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik sebelumnya tidak diwajibkan untuk melakukan pengakuan atas aset maupun liabilitas pajak tangguhan. Menurut IAI (2025), pajak tangguhan dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan.
2. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Pajak tangguhan timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan basis pengakuan antara standar akuntansi keuangan dan regulasi perpajakan yang

bersifat temporer. Aset dan liabilitas pajak tangguhan merepresentasikan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang atau dibebankan di periode sekarang. Penyesuaian tersebut dikenal dengan sebutan koreksi fiskal. Dari perspektif perpajakan, meskipun perhitungan pajak di Indonesia tetap berlandaskan pada ketentuan fiskal, adanya perbedaan perlakuan antara SAK ETAP dan SAK EP menimbulkan potensi koreksi fiskal, baik yang bersifat temporer maupun permanen. Kondisi tersebut dapat memunculkan aset maupun liabilitas pajak tangguhan, khususnya pada pos-pos seperti cadangan kerugian piutang (CKPN), imbalan pascakerja, serta pendapatan diterima di muka (Rizky, 2025).

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menyajikan deskripsi empiris mengenai suatu fenomena melalui penggunaan data berbasis angka (Sucipto, 2025). Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan deskripsi yang lebih jelas dan terstruktur sehingga dapat memperkuat pemahaman terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Data kualitatif, merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, rekaman, atau bahan tertulis berbentuk uraian (Waruwu, 2024). Data kualitatif yang diperoleh oleh penulis yaitu pengamatan secara langsung di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin serta wawancara antara penulis dengan auditor yang menangani perusahaan PT ADK.
2. Data Kuantitatif, merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran (Balaka, 2022). Data kuantitatif yang diperoleh penulis seperti laporan posisi keuangan (diolah) dan daftar koreksi fiskal (diolah) yang ada pada BPR PT ADK periode 2025.

3.2.1. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya (Balaka, 2022). Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh dari KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, berupa laporan neraca dan koreksi fiskal yang telah diolah yang dimiliki BPR PT ADK untuk periode 2024, serta literatur pendukung berupa buku-buku yang relevan dengan topik penelitian dan jurnal-jurnal terdahulu. Pemanfaatan data sekunder tersebut bertujuan untuk memberikan landasan empiris sekaligus memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

3.3 Metode pengumpulan Data

Menurut Abdullah et al. (2022), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir terdiri atas beberapa teknik yang dirancang untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan data yang relevan serta dapat dipercaya, maka dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Metode Wawancara

Penulisan ini dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab antara penulis dan narasumber pihak KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin yaitu instruktur lapangan dan Tim Auditor yang menangani secara langsung proses audit PT ADK khususnya pada bagian pencatatan yang ada hubungannya dengan perhitungan pajak tangguhan

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seuruh data yang diperlukan untuk penulisan. Dalam upaya melaksanakan metode dokumentasi, penulis mendokumentasikan data terkait kegiatan Praktik Kerja Lapangan, proses perhitungan pajak tangguhan, serta dokumen lain pada PT ADK yang ada dari KAP yang relevan dengan

penulisan laporan akhir.

3. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam suatu penulisan. Pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber buku, jurnal, dan *website* resmi serta media lainnya.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto dan Muhaemin yang berlokasi di Jalan Pelita I No.2 D Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan enam hari dalam seminggu dengan jam operasional 08.00-17.00.

3.4.2 Profil Singkat KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin (Cabang Lampung)

Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan perusahaan penyedia jasa profesional yang berfokus pada pilar utama akuntansi, yaitu: auditing, akuntansi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Dengan kantor pusat di Jakarta dan cabang di Lampung). Berdiri sejak tahun 1994 dengan nama awal KAP Drs. R. Weddie Andriyanto. Kantor Akuntan Publik (KAP) ini telah melewati perjalanan panjang dan berbagai transformasi struktural guna meningkatkan kualitas layanannya. Bentuk identitas terbarunya secara resmi dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/KM.1/2012 pada tanggal 21 Februari 2012 dengan nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin.

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan kumpulan para konsultan profesional dibidang akuntansi dan manajemen yang dijalankan oleh 2 (dua) orang partner dan didukung oleh 19 orang staff profesional dan ahli. Para Partners dan staff profesional merupakan anggota beberapa organisasi seperti

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), OJK (FAPM, Perbankan Konvensional dan Syariah, serta IKNB), BI, BPK, dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin
 Sumber: Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin)

3.4.3 Struktur Organisasi

3.4.4 Visi dan Misi

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan usahanya, yaitu:

1. Visi:

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan konsultan dengan visi memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk keuntungan kliennya dan masyarakat lingkungannya.

2. Tujuan:

Tujuan utama kami adalah menyediakan jasa untuk memberikan solusi pada klien kami, untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan untuk bersaing dalam aktivitas perusahaan.

3.4.5 Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan yang diberikan oleh KAP Weddie & Muhaemin tidak hanya melayani jasa Audit saja, tetapi terdapat sembilan pelayanan yang diberikan antara lain:

1. Jasa Audit, terdiri atas:
 - a) Pemeriksaan laporan keuangan (General Audit)
 - b) Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
 - c) Pemeriksaan Operasional (Operational Audit)
 - d) Pemeriksaan Kinerja (Performance audit)
 - e) Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Audit)
2. Jasa Atestasi
3. Jasa Review Laporan Keuangan
4. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan
5. Jasa Perpajakan
6. Jasa Penyusunan Proposal Kredit
7. Jasa Penyusunan Studi Kelayakan (F S)
8. Jasa Perancangan Sistem
9. Jasa Recruitment & Pelatihan

3.4.6 Pengguna Jasa atau Klien

Pemakai Jasa KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin adalah publik yang meliputi badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum serta perseorangan. KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin memberikan jasa kepada perusahaan swasta nasional dan organisasi non komersil lainnya, yang bergerak dalam bidang:

1. Perbankan
2. Pembiayaan
3. Hotel & Travel
4. Kontraktor
5. Organisasi Nirlaba (LSM)
6. Dana Pensiun

7. Pertanian dan Peternakan
8. Farmasi Distributor
9. Rumah Sakit (Pemerintah & Swasta)
10. Manufaktur
11. Asuransi
12. Pusat Pendidikan
13. Percetakan
14. Pemerintahan (BLU, BLUD, PILKADA, PILGUB, dan PILPRES)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan observasi pada PT ADK, dapat disimpulkan bahwa perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP dalam perlakuan pajak tangguhan memberikan 3 simpulan yang diberikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada:

- 1.** Dapat disimpulkan bahwa pencatatan pajak tangguhan di PT ADK belum melakukan perhitungan dan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Oleh karena itu, laporan keuangan PT ADK belum mampu mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam penyajian laporan keuangan pada PT ADK tahun 2024 sebagai dasar komparatif saat perusahaan ketika menerapkan SAK EP di tahun 2025.
- 2.** Penerapan SAK EP, khususnya Bab 29, mewajibkan pengakuan pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP. Pada laporan keuangan PT ADK tahun 2024 terdapat koreksi pada laporan keuangan pada beda waktu dari imbalan pasca kerja sebesar Rp234.386.153 yang menimbulkan aset pajak tangguhan senilai Rp51.564.954. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa laporan posisi keuangan PT ADK kini lebih mencerminkan manfaat pajak di masa depan, sehingga penyajian laporan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Penerapan retrospektif dalam transisi ke SAK EP mengharuskan penyesuaian saldo ekuitas dan penyajian kembali data komparatif, sehingga laporan keuangan PT ADK lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, implementasi SAK EP tidak hanya menambah kewajiban teknis berupa pengakuan pajak tangguhan, tetapi juga meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan serta memperkuat akuntabilitas dan daya saing entitas privat di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan penyajian laporan keuangan PT ADK adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT ADK

- a) Meningkatkan pemahaman mendalam mengenai SAK EP, khususnya terkait pengakuan pajak tangguhan, agar pencatatan transaksi lebih terkontrol dan sesuai standar.
- b) Melakukan pengecekan berkala atas penerapan pajak tangguhan, termasuk penyesuaian retrospektif, sehingga laporan keuangan tetap konsisten dan transparan.

2. Bagi Mahasiswa Akuntansi

- a) Menjadikan penelitian mengenai transisi dari SAK ETAP ke SAK EP sebagai referensi untuk memahami dampak praktis pengakuan pajak tangguhan terhadap laporan keuangan entitas privat.
- b) Mempelajari secara lebih mendalam Bab 29 SAK EP tentang pajak tangguhan, serta membandingkannya dengan ketentuan IFRS, agar memiliki perspektif internasional dalam praktik akuntansi.
- c) Menggunakan kasus PT ADK sebagai studi empiris untuk melatih keterampilan analisis laporan keuangan, khususnya dalam mengidentifikasi beda tetap dan beda waktu serta implikasinya terhadap pajak kini dan pajak tangguhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. W., Hartanti, D., Permatasari, H., Wicaksono Septyanto, A., & Abi Bagaskara, Y. (2022). Penerapan Data Mining untuk Memprediksi Jumlah Produk Terlaris Menggunakan Algoritma Naive Bayes Studi Kasus (Toko Prapti). *Tipes, Kec. Serengan, 13*(2), 57154.
- Adisti, C. G., & Devianti, H. Y. (2024). Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat Pada Guru Smk Di Jawa Barat. *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri, 6*(1), 40–45. <https://doi.org/10.33480/abdimas.v6i1.5413>
- Anshari, K., & Anggraita, V. (2025). Analisis Perubahan Kebijakan Akuntansi Dari Sak Etap Ke Sak Ep (Studi Kasus: Entitas X). *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 4*(10), 9874–9887. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i10.4946>
- Aprilia, F., Saputri, M. I., Damayanti, D., Roviah, R., & Mais, R. G. (2025). Optimalisasi Penerapan Sak Entitas Privat Pada Laporan Keuangan Pt Xyz. *Land Journal, 6*(1), 232–241. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.3809>
- Balaka, Muh. Y. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, 1*, 130.
- Devi, L. R., Herlintang, M., Khoirunnisa, L., & Salsabila, Z. (2025). Analisis Komparatif Standar Akuntansi Keuangan Internasional (Ifrs) Dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen, 2*(2), 691–702. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5212>
- Erick, R. (2025). *Teori Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Berbasis Sustainability sebagai Pengganti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) beserta Analisis Perbedaan dan Implementasinya.*
- Gusneli, G., Sudarmanto, E., & Devi, E. K. (2023). Tantangan dan Peluang Dalam Implementasi Standar Akuntansi Internasional Terbaru (IFRS). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science, 2*(03), 205–212. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.643>
- Hamdi, H., & Utami, T. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Industri Makanan dan Minuman. *Nusa Akuntansi, 1*(3), 1050–1068.
- IAI. (2020). Dtaft Eksposur Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat. *Ikatan Akuntan Indonesia, 271*. http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf
- IAI. (2024a). *Sosialisasi - Permenkop UKM 2/2024: Kebijakan Akuntansi Koperasi*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/sosialisasi_-

permenkop_ukm_22024_kebijakan_akuntansi_koperasi#gsc.tab=0. Diakses pada 18 Februari 2026.

- IAI. (2024b). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat*.
- IAI. (2025). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 212 Pajak Penghasilan*. 1–78.
- IAI. (2026). *Produk SAK Entitas Privat Disahkan*. [https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Produk SAK Entitas Privat Disahkan#gsc.tab=0](https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Produk%20SAK%20Entitas%20Privat%20Disahkan#gsc.tab=0). Diakses pada 18 Februari 2026.
- Madaharsa, A. S., & Muslimin, M. (2025). Analisis Implementasi Sak Etap Menjadi Sak Ep: Studi Komparatif Perusahaan Manufaktur Dan Jasa. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(2), 270–286. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2681>
- Nur, A., Aulia, A. (salsabila), Aryanti, D., Putri, D., Valentina, H., Putri Nasywa, & Putri, S. (2025). Landasan Standar Akuntansi Mengenai Perbandingan Prinsip Kerangka Konseptual Global Dan Realitas Indonesia. *Journal A.N.C Accounting Tax Audit Business Information Systems Informatics Technology*, 1(3), 200–215. <https://journal.anc-aryantonurconsulting.com/tp>
- Perdana, S. (2021). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Pt. Narasindo Mitra Perdana Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Pt. Narasindo Mitra Perdana. *Juripol*, 4(2), 283–295.
- Pramudya, A. (2026). *Mengenal SAK EP dan Apa Bedanya dengan SAK ETAP*. Jurnal.Id. <https://www.jurnal.id/id/blog/sak-ep/>
- Prasasti, N. D., Oktaliza, M., & Putra, I. (2025). *Penerapan International Financial Reporting Standars (Ifrs) dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. 2(2), 1880–1890.
- Pratama, M. Y., & Indrawati, L. (2021). Perancangan Model Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Berbasis Microsoft Excel (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Menengah Jasa Ekspedisi Pupuk Kujang-Kab. Karawang). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 314–327. <https://jurnal.polban.ac.id/ialj/article/view/2515>
- Rizky, W. R. (2025). Analisis Dampak Transisi Dari SAK ETAP Ke SAK EP Terhadap Laporan Keuangan Dan Implikasinya Pada Perpajakan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 708–721. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5948>
- Septianingrum, F., Damayanti, & Maryani. (2022). Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (The Effect of Current Tax Expense, Deffered Tax Expense and Deffered Tax Asset on Earnings Management). *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 1–13.

- Sucipto, B. (2025). Analisis Strategi Retorika pada Editorial Keperawatan: Logos, Ethos, dan Pathos pada Teks Jurnal Keperawatan dengan Pendekatan Deskriptif-Kuantitatif. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(5), 1496–1508. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32155>
- Suhendar, E., Rusmana, O., & Putri, N. K. (2023). Analisis Persepsi Dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Sak Etap Terhadap Sak Entitas Privat (Ep) Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3), 330–338. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26569>
- Sukma, T., Purba, A., Simbolon, R. D., Simbolon, A. M., Sianipar, S., Maria, H., & Putri, G. (2025). Economics and Digital Business Review Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia Kajian Pustaka. *Economics and Digital Business Review*, 6(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 46 BPK RI 171 (2007). <https://doi.org/10.2320/materia.46.171>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>